

eJournal Administrasi Negara, 2015: 3 (5), 1383-1396
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN
SANGASANGA KABUPATEN
KUTAI KARTANAGARA**

Junaidi Nur Hidayat

**eJournal Administrasi Negara
Volume 3, Nomor 5, 2015**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara**

Pengarang : Junaidi Nur Hidayat

NIM : 1102015202

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Oktober 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si
NIP. 19600114 198803 1 003

Dr. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 19760216 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Adminisrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 025
Volume : 3	
Nomor : 5	
Tahun : 2015	
Halaman : 1383-1396 (Ganjil)	

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KELURAHAN JAWA KECAMATAN SANGSANGSA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Junaidi Nur Hidayat¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah dilaksanakan, yaitu berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya,. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang infrastruktur tidak dapat melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung. Selain itu pada pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan mengalami masalah yaitu dalam pengembalian pinjaman, karena sebagian besar masyarakat menganggap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan bantuan lepas, sehingga masyarakat yang pinjam tidak mau membayar dan tidak ada sangsi tegas. Kemudian pada pelaksanaan pelatihan budidaya jamur juga mengalami masalah yaitu kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program ini.

Kata kunci : *Implementasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*

PENDAHULUAN

Setiap Negara yang berdaulat selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan Bangsa Indonesia, seperti yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi : kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : junaidinurhidayat14@gmail.com

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri juga merupakan upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Kelurahan merupakan basis Ketahanan Nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia berada di Kelurahan, dan tidak terkecuali Kelurahan Jawa yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kelurahan Jawa telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kategori perdesaan sejak tahun 2009 yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di perdesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Namun dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa berdasarkan observasi yang penulis lakukan secara langsung di Kelurahan tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana dalam pelaksanaan program SPP ini terjadi kemacetan yang disebabkan oleh :

1. Dari segi sosial masyarakat kelurahan jawa, sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa kegiatan simpan pinjam identik dengan kegiatan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD), bantuan tanpa bunga yang digulirkan oleh pemerintah daerah
2. Kurangnya pembinaan kelompok. Yaitu Peran Aktif Lembaga UPK dalam melestarikan dana bergulir hanya sebatas menggulirkan dana, aspek resiko dana perguliran kurang diperhatikan. Fasilitator Kecamatan kurang diajak komunikasi dalam hal perguliran kelompok SPP.
3. Kurang tegasnya kelembagaan PNPM dalam mengatasi kredit macet. Kelembagaan PNPM yang ada di Kecamatan Sangasanga, BKAK, TV perguliran BP-UPK, yang masih dikendalikan oleh UPK, sehingga antar lembaga nyaris tidak ada komunikasi untuk melestarikan kegiatan dana bergulir.

Selain permasalahan kemacetan program SPP, terjadi pula permasalahan yang terjadi dalam program pelatihan budidaya jamur. Sejak dimulainya pelatihan budidaya jamur sampai saat ini, tidak ada perkembangan dalam program tersebut, bahkan saat itu hanya tersisa satu orang yang bertahan dalam pelatihan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, diketahui penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program pelatihan budidaya jamur tersebut, yaitu :

1. Kurangnya minat masyarakat dalam program pelatihan budidaya jamur.
2. Kurang telatennya masyarakat dalam melaksanakan pembudidayaan jamur yang berakibat kegagalan dalam percobaan di lapangan.
3. Ketidaksabaran masyarakat dalam kegiatan pelatihan budidaya jamur, yang memang membutuhkan perawatan khusus serta keahlian yang baik.

Segala permasalahan yang ada tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa. Maka berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan

Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata polos dalam bahasa Yunani (*Greek*) berarti negara atau kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* yang berarti negara, sedangkan dalam Bahasa Inggris lama (*Middle English*) menjadi *policie* yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan.

Menurut George C. Edward III dan Sharkanky (dalam Islamy, 2004:18) adalah “*is what government say and do. It is the goals or purpose of government programs*” artinya “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Agustino, 2006:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Implementasi

Higgins (dalam Salusu, 2005:409) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Program

Program merupakan implementasi dari kebijakan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Adapun pengertian program (dalam Pasolong, 2007:92) adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Parsons (dalam Suharto, 2005:59) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi kehidupannya, pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Tujuan Pemberdayaan

Menurut Ife (dalam Suharto, 2005:58) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (2000:17) masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi melalui suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:2) pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan :
 - a. Bidang Infrastruktur :
 - 1) Pembangunan Sekolah Dasar 03
 - 2) Pengadaan Air Bersih
 - 3) Normalisasi Parit
 - b. Bidang Ekonomi :
 - 1) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
 - c. Bidang Sosial :
 - 1) Pelatihan Budidaya Jamur
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi key-informan adalah Fasilitator PNPM-MPd dan Ketua LPM, sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Lurah Kelurahan Jawa dan masyarakat Kelurahan Jawa yang terlibat ke dalam pelaksanaan program.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:69) Pengumpulan data merupakan proses pengadaaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada.
 - b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).
 - c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Daerah penelitian

Profil Kecamatan Sangasanga

Sangasanga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di kawasan Delta Mahakam dengan luas wilayah mencapai 233,4 Km². Dengan luas wilayah tersebut, menempatkan kecamatan sangasanga menjadi kecamatan dengan luas wilayah paling kecil di Kutai Kartanegara. Sebelum bergabung dalam Kabupaten Kutai pada tahun 1988, Kecamatan Sangasanga merupakan bagian Kotamadya Samarinda. Masuknya Sangasanga ke dalam wilayah Kabupaten Kutai ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987. Kecamatan Sangasanga memiliki 22.512 jiwa (2014) yang tersebar di 5 Kelurahan, seperti Kelurahan Sangasanga Dalam, Kelurahan Jawa, Kelurahan Pendingin, Kelurahan Sarijaya, dan Kelurahan Sangasanga Muara.

Profil Kelurahan Jawa

Kelurahan Jawa merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Sangasanga dengan jumlah penduduk mencapai 2.616 jiwa, terdiri dari 1.438 jiwa laki-laki dan 1.178 jiwa perempuan yang tersebar di 9 RT. Kelurahan Jawa memiliki luas wilayah 6,9 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga
- Sebelah Selatan : Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa
- Sebelah Timur : Kelurahan Kembang Kecamatan Muara Jawa
- Sebelah Barat : Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jawa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga yang berkedudukan di desa/kelurahan, melaksanakan tugas sebagai mitra kerja yang bekerja secara berdampingan dan bersinergi dengan aparatur pemerintah desa dan BPD, berfungsi sebagai penampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga di bidang pembangunan desa/kelurahan, yang dibentuk oleh Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan atas aspirasi dan kebutuhan warga.

Pelaksanaan dalam Bidang Infrastruktur

Pembangunan Sekolah Dasar 03

Pembangunan Sekolah Dasar 03 merupakan usulan dari warga Kelurahan Jawa dan disetujui pada rapat di Balai Desa. Jika ditinjau dari segi kelayakan, bangunan Sekolah Dasar 03 sangat membutuhkan perhatian yang khusus, karena memang dianggap cukup rawan baik untuk guru maupun murid.

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan Sekolah Dasar 03 sudah dilaksanakan bahkan sudah terselesaikan. Pembangunan Sekolah Dasar 03 ini hanya bersifat lokal, bukan keseluruhan, jadi hanya ada pembangunan untuk 3 ruang kelas saja. Menurut pendapat Lurah Kelurahan Jawa dan masyarakat, pembangunan ini memberikan rasa puas, karena dinilai begitu banyak hal positif yang ditimbulkan berkat adanya pembangunan ini, bukan hanya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi guru dan murid, tetapi juga bagi orang tua murid. Dari pembangunan ini, semua berharap agar kelangsungan proses belajar mengajar akan semakin aman dan nyaman.

Pengadaan Air Bersih

Pengadaan air bersih merupakan salah satu solusi bagi masyarakat Kelurahan Jawa dan juga disetujui banyak pihak sehingga pada tahun 2012, melalui bantuan PNPM-MPd sekaligus swadaya masyarakat Kelurahan Jawa, pengadaan air bersih pun dilaksanakan. Sesuai kesepakatan bersama, maka pengadaan air bersih diadakan di RT. 09 sebagai percobaan awal sebelum memperluas ke delapan RT lainnya, karena pemerintah Kelurahan Jawa ingin melihat apakah pengadaan air bersih ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan juga sesuai dengan yang diharapkan.

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program pengadaan air bersih sudah dilaksanakan, dan dalam pelaksanaannya mendapat swadaya dari warga Kelurahan Jawa sebesar Rp. 1.425.000,-. Warga merasa cukup puas dengan adanya program ini, dan memberikan sebuah masukan agar pengadaan air bersih dapat diadakan disemua RT di Kelurahan Jawa. Selain itu, sebagai bentuk kepuasannya, warga Kelurahan Jawa memelihara dengan cukup baik hasil dari program PNPM-MPd ini.

Normalisasi Parit

Normalisasi parit adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di RT. 08 sampai RT. 09 di Kelurahan Jawa. Normalisasi parit ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir jika hujan lebat. Dengan normalisasi parit ini, masyarakat tidak lagi cemas lingkungannya terendam banjir ketika musim hujan tiba.

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa normalisasi parit di Kelurahan Jawa sudah dilaksanakan dengan panjang mencapai 700 Meter. Dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi parit ini, warga Kelurahan Jawa tidak dapat dilibatkan, karena alasan jam kerja. Sehingga agar program ini tetap dapat dilaksanakan, sebagai gantinya tim pelaksana kegiatan menyerahkan kepada warga Kelurahan Jawa yang belum memiliki pekerjaan. Pengerjaan ini diberi waktu selama 6 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 20 orang. Warga Kelurahan Jawa merasa puas dengan hasil kegiatan ini dan merasa kegiatan ini sangat berguna bagi lingkungan dan menghindari adanya tumpukan sampah yang bisa mengakibatkan banjir apabila ada hujan lebat.

Pelaksanaan dalam Bidang Ekonomi

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah pemberian modal untuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Ketentuan mengikuti program ini, pemohon wajib mempunyai kelompok yang minimal beranggotakan 5 orang, dan wajib membuat proposal usaha.

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program Simpan Pinjam Perempuan ini sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sampai saat ini sudah ada 24 kelompok yang mengikuti program ini. Namun sangat di sayangkan saat ini hanya tersisa 13 kelompok SPP yang masih aktif dan 11 lainnya mengalami kemacetan dalam pengembalian. Warga merasa sangat puas dengan adanya program ini, karena dinilai sangat membantu khususnya ibu-ibu yang memiliki usaha, khususnya ibu-ibu di Kelurahan Jawa.

Pelaksanaan dalam Bidang Sosial

Pelatihan Budidaya Jamur

Pelatihan budidaya jamur adalah pelatihan yang diberikan untuk warga Kelurahan Jawa yaitu cara pembudidayaan, perawatan, serta pengaturan suhu yang tepat agar mendapat hasil maksimal dari pembudidayaan tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelatihan budidaya jamur ini dilaksanakan pada tahun 2011. Program pelatihan budidaya jamur ini hanya diikuti oleh 10 orang warga Kelurahan Jawa saja. Bahkan setelah berjalan, hanya menyisakan satu orang peserta pelatihan, yaitu bapak Tanto. Harapan dari Pemerintah Desa, yaitu banyak warga Kelurahan Jawa yang mau mengikuti pelatihan ini, karena dianggap cukup baik dan akan berdampak positif bagi warga Kelurahan Jawa. Namun pada kenyataannya, warga Kelurahan Jawa kurang tertarik dengan adanya program pelatihan budidaya jamur ini, karena dianggap rumit dan cukup menyita waktu.

Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kelurahan Jawa

Setiap kegiatan tentu selalu ada hal yang menjadi faktor pendukung, agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd, meskipun masih sangat minim. Lain dari itu, tenaga kerja, lahan untuk pelaksanaan kegiatan serta pendanaan yang diberikan melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian terpenting dalam menunjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan di Kelurahan Jawa.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Di Kelurahan Jawa

Setiap kegiatan tidak pernah lepas dari yang namanya faktor penghambat, yang merupakan halangan dalam pelaksanaan kegiatan yang kurang menguntungkan, serta memperlambat pelaksanaan. Begitu pula dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah masyarakat Kelurahan Jawa sendiri, serta Ketua RT. Kurangnya kesadaran Ketua RT dalam menanggapi kegiatan PNPM-MPd ini sungguh sangat disayangkan. Selain itu, keterbatasan informasi yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan dalam Bidang Infrastruktur

Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Tahun 2014, tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan, dan dengan tujuan khususnya yaitu meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dari segala

kalangan baik dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan pembangunan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat di wilayah perdesaan.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat tidak sesuai dengan tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dengan apa yang diharapkan. Jadi, yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur ini dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Serta masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan lingkungan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya tujuan pembangunan nasional. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terlihat bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan berada sangat jauh di bawah standar.

Pelaksanaan dalam Bidang Ekonomi

Dalam penjelasan PTO IV PNPM-MP (hal. 58), Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai usaha kecil. Secara umum, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan serta kemudahan akses untuk pendanaan sebuah usaha mikro, selain itu sebagai pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Secara khusus, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan pelayanan program kegiatan dana bergulir, mempercepat proses serta pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, selain itu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat sebuah kesalahan dalam pengertian atau tanggapan dari peserta kegiatan yang menyebabkan kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa kegiatan simpan pinjam identik dengan kegiatan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD), bantuan tanpa bunga yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Hal lain penyebab kemacetan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini adalah kurangnya pembinaan kelompok. Peran aktif Lembaga UPK, serta kurangnya komunikasi antara fasilitator kecamatan dalam hal perguliran dengan kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Kemudian kurang tegasnya kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam mengatasi kredit macet.

Pelaksanaan dalam Bidang Sosial

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP, tujuan diadakannya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan dalam rangka menunjang pendapatan. Dalam hal ini, yang dimaksud keterampilan adalah bahwa setiap masyarakat pasti memiliki potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya masing-masing.

Namun, apa yang terjadi sangat memprihatinkan, sehingga tujuan dari adanya kegiatan pelatihan ini tidak dapat dicapai. Semua ini dikarenakan kurang terariknya masyarakat Kelurahan Jawa dengan kegiatan pelatihan ini. Ketidaktertarikan

masyarakat terhadap kegiatan pelatihan ini sudah jelas didasari oleh keterbatasan sosialisasi. Dapat dilihat dari persentase kehadiran masyarakat yang jauh dari standar.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Faktor Pendukung

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dilakukan di Kelurahan Jawa ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena segala kegiatan telah terlaksanakan dan diselesaikan. Meskipun dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa ini sangat kurang sekali partisipasi masyarakatnya. Namun, setidaknya masih ada masyarakat yang mau terlibat.

Faktor pendanaan dari pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program ini, karena keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah terutama bantuan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan, serta memecahkan persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian masyarakat dan kesejahteraannya. Pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik diperlukan dana yang terus menerus setiap periodenya. Pada bidang ekonomi yang kegiatannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk membuka usaha atau meningkatkan usahanya yang telah ada menjadi lebih berdaya guna lagi.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa menurut hasil penelitian yang penulis lakukan mendapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Yaitu partisipasi masyarakat yang dinilai masih minim sekali, serta partisipasi dari beberapa Ketua RT yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PNPM-MPd ini. Akibat beberapa Ketua RT yang tidak hadir dalam rembuk warga ini, peran para Ketua RT sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd ini dinilai belum optimal untuk pemberdayaan. Seharusnya dalam pelaksanaan PNPM-MPd ini, masyarakat terutama para RT dituntut untuk berpartisipasi aktif terhadap segala kegiatan PNPM-MPd.

Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan mengadakan musyawarah, menyampaikan langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya dan masyarakat terlibat dalam monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya Ketua RT tersebut malas untuk mengurus segala keperluan proposal pengajuan untuk RTnya sendiri karena menganggap kegiatan ini berbelit-belit dan menyita banyak waktu mereka, karena harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan dan kegiatan PNPM-MPd.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana permasalahan pada penelitian ini dan telah diuraikan dalam penyajian data dan pembahasan mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kelurahan Jawa Kecamatan

Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

Pelaksanaan dalam Bidang Infrastruktur

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa pada bidang infrastruktur dapat dikatakan belum memenuhi standar serta belum mencapai tujuan semestinya. Hal ini disebabkan masih kurangnya keterlibatan masyarakat Kelurahan Jawa secara aktif dalam segala pelaksanaan kegiatan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat adanya sumbangan dana dari masyarakat. Namun itu saja belum cukup, karena tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan itu sendiri adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat serta memberdayakan masyarakat Kelurahan Jawa, yang diharapkan dapat terus berlanjut dari, oleh dan untuk masyarakat Kelurahan Jawa itu sendiri.

Pelaksanaan dalam Bidang Ekonomi

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada bidang ekonomi dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik, meskipun pada pelaksanaannya masih ada permasalahan yang terjadi terkait kemacetan yang diakibatkan banyaknya peserta kegiatan yang tidak mengetahui secara detil ketentuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Di luar dari permasalahan yang terjadi, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Jawa ini dinilai telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Selain itu, pinjaman yang diberikan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan juga dinilai telah digunakan sesuai dengan fungsinya.

Pelaksanaan dalam Bidang Sosial

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa pada bidang sosial yaitu pelatihan budidaya jamur ini dinilai sangat buruk. Hal ini disebabkan karena keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan sangat minim sekali. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat tercapai. Selain itu yang lebih disayangkan lagi, pelatihan ini merupakan usulan dari masyarakat Kelurahan Jawa sendiri yang telah disetujui pada rapat musyawarah desa. Oleh karena itulah, pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya jamur ini dinilai tidak efektif serta hanya membuang-buang dana dari pemerintah saja.

Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa

Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini adalah keterlibatan pemerintah dalam segi pendanaan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang memudahkan masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana juga merupakan bagian dari penunjang dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Faktor penghambat

Tidak adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Jawa secara langsung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, sehingga program berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan mengubah tujuan

utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang awalnya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Selain itu, sulitnya mendapatkan relawan yang berjiwa sosial tinggi serta keterbatasan informasi yang didapat oleh masyarakat juga menjadi penghambat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan kerendahan hati dapat penulis berikan beberapa saran-saran, di antaranya adalah :

1. Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya dalam bidang infrastruktur diharapkan dapat melibatkan masyarakat Kelurahan Jawa secara langsung baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Selain itu memaksimalkan peran Ketua RT, dimana Ketua RT sebagai relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk mendukung segala kegiatan PNPM-MPd di Kelurahan Jawa, yang bertugas sebagai pemimpin serta mengarahkan masyarakatnya agar dapat bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, untuk bersama-sama melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
2. Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya dalam bidang ekonomi, diharapkan pemerintah desa lebih memberikan pemahaman mengenai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bantuan ini merupakan bantuan lepas. Sehingga tujuan dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini dapat tercapai sekaligus bantuan yang diberikan menjadi tepat guna.
3. Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya dalam bidang sosial yaitu pada kegiatan pelatihan budidaya jamur, sebaiknya diganti dengan program pelatihan yang lain, yang lebih menarik minat masyarakat. Misalkan pelatihan mengemudi, menjahit, atau yang lainnya yang mampu menarik banyak minat masyarakat Kelurahan Jawa, sehingga tidak menyia-nyiakan dana yang telah diberikan pemerintah.
4. Diharapkan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini lebih meningkatkan pemantauan dan pengawasan, yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan tersebut. Serta meminimalisir segala bentuk kemungkinan dalam penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab. Dimana pemantauan dan pengawasan ini merupakan tanggung jawab dari setiap pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yaitu : Masyarakat Kelurahan Jawa, Lurah Kelurahan Jawa, Fasilitator PNPM-MPd, LPM, Lembaga UPK, dan relawan kegiatan PNPM-MPd.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Revisi). Bandung: Humaniora Utama Press.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Belajar.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodeologi, Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. Jakarta: LP3ES.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purta, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, Jasini Vera. 2005. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Jakarta: SEMERU.
- Salusu, J. 2005. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sulistiyani, Ambar, Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wignyosoebroto, Soetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradikma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Dokumen:

Buku Profil Kelurahan Jawa

PTO PNPM Mandiri

Peraturan Perundang-undangan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Keputusan Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.